LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 110 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN STATUS AKREDITASI
LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA (LPPBJ) TAHUN 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa, perlu dilakukan akreditasi terhadap Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ);
b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 6 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Status Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ) Tahun 2019;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelatihan Pengadaan Barang Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 662);

jdih.lkpp.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA (LPPBJ) TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan status akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat LPPBJ, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : LPPBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh Sertifikat Akreditasi yang masa berlakunya sesuai dengan peringkat akreditasi.

KETIGA : Kepada LPPBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang terbukti memberikan data yang tidak benar atau melanggar peraturan, akan diberikan sanksi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Tata Usaha dan
Rumah Tangga

Ari Saindra

Tembusan Yth.:
1. Plt. Sekretaris Utama LKPP;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa LKPP;
3. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur;
5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
6. Ketua Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Gurindam.

jdih.lkpp.go.id

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA (LPPBJ) TAHUN 2019
NOMOR : 110 TAHUN 2019
TANGGAL : 22 Februari 2019

DAFTAR LPPBJ TERAKREDITASI

NO.	NAMA LEMBAGA	LOKASI	STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI	MASA BERLAKU
1.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur	Surabaya	Terakreditasi A	Februari 2019 s.d Februari 2024
2.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Bogor	Terakreditasi A	Februari 2019 s.d Februari 2024
3.	LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda	Samarinda	Terakreditasi B	Februari 2019 s.d Februari 2023
4.	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Gurindam	Tanjung Pinang	Terakreditasi B	Februari 2019 s.d Februari 2023

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Tata Usaha dan
Rumah Tangga

Ari Sulintra